

MENUJU KEDAULATAN PANGAN INDONESIA

Niken Paramita Purwanto*

11

Abstrak

Kemarau ekstrem disertai gelombang panas menjadi tantangan nyata yang bisa menurunkan bahkan menggagalkan produksi tanaman pangan. Mengantisipasi kondisi tersebut setiap negara harus memiliki mitigasi krisis pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Stok cadangan pangan pemerintah terhadap kebutuhan nasional bulanan mayoritas masih di bawah target. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kedaulatan pangan dan implementasinya. Mengingat dampak serius krisis pangan dalam kehidupan warga, pemerintah bersama pengambil kebijakan publik memiliki kewajiban serius untuk berkomitmen dalam pengembangan sistem dan kebijakan yang mendukung kedaulatan pangan. Hal ini bertujuan untuk mendorong ekonomi yang berkelanjutan secara ekologis dan adil. Konsep kedaulatan pangan meliputi segala aspek di dalam sistem pangan. Untuk mengatasi krisis pangan dan mewujudkan kedaulatan pangan, Komisi IV dan VI DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu memastikan agar program pemerintah dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan.

Pendahuluan

Presiden Joko Widodo telah memperingatkan potensi munculnya krisis pangan. Perubahan iklim dan dampak fenomena El Nino berperan sebagai faktor krusial dalam krisis ini. Kondisi kemarau ekstrem dan gelombang panas menjadi tantangan nyata yang berpotensi mengurangi bahkan menggagalkan produksi tanaman pangan. Ditambah lagi krisis geopolitik dunia perang Rusia dengan Ukraina yang menghambat

distribusi bahan pangan global. Indonesia sebagai negara yang belum berdaulat pangan juga terkena dampaknya. Selain itu, pertumbuhan populasi yang terus meningkat tidak diimbangi dengan kemampuan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara memadai.

Enam dari sembilan kebutuhan bahan pokok harus dipenuhi dari negara lain. Dalam 11 tahun terakhir, rakyat Indonesia telah

* Analis Legislatif Ahli Muda pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: niken.purwanto@dpr.go.id.



menghabiskan sekitar Rp1,272 triliun untuk belanja beras, susu, bawang, garam, daging, dan gula di pasar internasional (Kompas, 16 Oktober 2023). Stok cadangan pangan pemerintah terhadap kebutuhan nasional bulanan mayoritas masih di bawah target. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menargetkan stok cadangan pangan pemerintah (CPP) bisa mencapai 5% dari total kebutuhan. Namun sampai Juni 2023, stok CPP untuk beberapa komoditas masih di bawah target, bahkan mencapai 0% dari kebutuhan nasional (katadata.co.id, 26 Juni 2023).

Penyebab lain adanya ancaman krisis pangan adalah berkaitan dengan orientasi tata kelola pangan yang masih mengacu pada ketahanan pangan, bukan pada kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan didefinisikan sebagai hak setiap bangsa dan setiap rakyat untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional. Ancaman krisis pangan telah menjalar ke seluruh belahan dunia, yang ditandai dengan lonjakan harga pangan seperti beras, kedelai, dan jagung. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kedaulatan pangan dan implementasinya.

Konsep Kedaulatan Pangan

Mengingat begitu besarnya dampak buruk krisis pangan dalam kehidupan masyarakat, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah bersama para pengambil kebijakan publik untuk berkomitmen dengan serius mengembangkan sistem dan

kebijakan berdaulat pangan yang mendorong ekonomi yang ekologis dan berkeadilan. Konsep kedaulatan pangan meliputi segala aspek di dalam sistem pangan.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih menyatakan bahwa tata kelola pangan harus dimulai dari aspek atau subsistem penguasaan tanah (reforma agraria), model produksi (agroekologi), pengolahan dan penyimpanan (cadangan pangan), distribusi (tata niaga), dan konsumsi bagi kelebagaannya. Konsep ini sekaligus menjadi alternatif dan bahkan pengganti dari sistem pangan yang berlangsung selama ini. Tidak mementingkan siapa, bagaimana, dan kapan memproduksi pangan, serta dari mana asal pangan tersebut. Model program ketahanan pangan yang diusung pemerintah sangat rawan. Hal ini disebabkan terciptanya ketergantungan pada perdagangan dan pasar internasional, yang pada akhirnya memengaruhi tingkat kecukupan gizi dan keamanan pangannya/*food safety* (bisnis.tempo.co, 16 Oktober 2023).

Konsep kedaulatan pangan secara resmi telah menjadi tujuan dan pendekatan pembangunan pertanian di Indonesia sejak ditetapkannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 2 menyebutkan prinsip dan asas penyelenggaraan pangan di Indonesia yaitu berdasarkan kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemerataan, berkelanjutan, dan keadilan (dpr.go.id, 12 September 2017). Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap sumber-sumber pangan dari luar. Ini juga dimaksudkan agar tidak

lagi dijumpai persoalan dasar seperti gizi buruk, kelaparan, dan krisis pangan. Dalam UU Nomor 18 Tahun 2012, konsep kedaulatan pangan selalu muncul bersama dengan kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Namun tidak ada uraian yang memadai dan jelas tentang kedaulatan pangan. Misalnya hubungan antara kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, sehingga sampai hari ini tidak ada kemajuan dan masih tergantung dengan pangan impor.

Implementasi Kedaulatan Pangan

Dalam Nawacita Presiden Joko Widodo menawarkan sembilan agenda perubahan. Agenda ke tujuh adalah lima program, yaitu membangun kedaulatan pangan, energi, keuangan, memandirikan bank petani/nelayan, dan mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional. Untuk merealisasikan agenda ini Presiden mengeluarkan kebijakan program lumbung pangan/*food estate* (nasional.kompas.com, 21 Mei 2014). Kebijakan ini menjadi salah satu yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Konsep dasarnya adalah untuk mengembangkan sistem pangan secara integratif dalam sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan. Pelaksanaan proyek ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan pelaksanaannya diserahkan kepada lintas kementerian, meliputi Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian

Pertahanan dan Kementerian PUPR. Proyek lumbung pangan ini dinilai belum optimal dalam menciptakan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan. Proyek pemerintah tersebut hanya menjawab tantangan jangka pendek untuk mengatasi kerawanan pangan karena pengelolaannya diserahkan kepada korporasi, bukan masyarakat lokal.

Ada empat bidang prioritas dalam pengembangan kedaulatan pangan, yaitu *pertama*, hak atas pangan, *kedua*, akses terhadap sumber daya produktif, *ketiga*, mengembangkan produksi ramah lingkungan dan *keempat*, perdagangan dan pasar lokal. Kedaulatan pangan hanya bisa terjadi ketika petani memiliki, menguasai, dan mengontrol alat-alat produksi pangan (tanah, benih, air, pupuk, pestisida dan teknologi). Aspek kemandirian pangan, perlindungan petani, dan ekosistem lokal sangat penting (Kompas, 16 Oktober 2023).

Beberapa strategi yang dapat dilakukan, yaitu *pertama*, diversifikasi pertanian dengan mendorong pertanian yang beragam dapat membantu mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim dan penyakit. *Kedua*, promosi pertanian berkelanjutan dengan menerapkan praktik pertanian berkelanjutan, seperti pertanian organik dan penggunaan pupuk alami. *Ketiga*, pengembangan teknologi pertanian dengan penerapan teknologi modern dalam pertanian, seperti penggunaan irigasi yang efisien dan varietas tanaman unggul. *Keempat*, manajemen rantai pasokan pangan yang kuat dengan memastikan rantai pasokan

pangan yang efisien, termasuk penyimpanan dan distribusi yang baik, dapat mengurangi kerugian pasokan. *Kelima*, sistem peringatan dini dengan membangun sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi ancaman potensial terhadap ketahanan pangan, seperti bencana alam atau serangan hama. *Keenam*, pemberdayaan petani dan peternak melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan akses petani serta peternak ke sumber daya, seperti kredit dan input pertanian, dapat meningkatkan produktivitas mereka (cnbcindonesia.com, 20 Juli 2023).

Penutup

Pemerintah harus memiliki komitmen kuat untuk mencapai kedaulatan pangan nasional bersama masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengantisipasi terjadinya krisis pangan dunia. Hal yang wajib dilakukan pemerintah adalah membuat kedaulatan pangan sebagai agenda yang sangat penting dan memikirkan secara serius bagaimana Indonesia bisa menjadi negara yang berkedaulatan pangan. Program-program yang dibuat mengutamakan kepentingan masyarakat luas, bukan individual atau kelompok tertentu. Program harus bertujuan untuk menyejahterakan petani dan mendorong tercapainya kedaulatan pangan. Tujuan antaranya adalah bagaimana meningkatkan produksi pangan melalui diversifikasi tanaman pangan sesuai potensi daerah.

DPR RI khususnya Komisi IV dan VI melalui fungsi pengawasan perlu terus memonitor pelaksanaan program ketahanan pangan pemerintah untuk menangani krisis pangan dan mencapai kedaulatan

pangan. Selain itu, DPR RI harus memastikan bahwa alokasi anggaran pemerintah di Kementerian Pertanian dan/atau BKP (Badan Ketahanan Pangan) terpenuhi dan tepat sasaran untuk mewujudkan pertanian yang berkelanjutan menuju kedaulatan pangan.

Referensi

- "Ilusi Kedaulatan Pangan", *ikem*, 16 Oktober 2023, hal. 6.
- "Cuaca Panas El Nino, Sumber 'Malapetaka' Bumi Tahun Ini", *cnbcindonesia.com*, 20 Juli 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230720105205-128455805/cuaca-panas-el-nino-sumber-malapetaka-bumi-tahun-ini>, diakses 17 Oktober 2023.
- "Krisis Pangan Semakin Nyata, SPI: Perlu Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan", *bisnis.tempo.co*, 16 Oktober 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1784345/krisis-pangan-semakin-nyata-spi-perlu-reforma-agraria-dan-kedaulatan-pangan>, diakses 17 Oktober 2023.
- "Naskah Akademik dan Undang-Undang tentang Sistem Pertanian Berkelanjutan", *dprri.co.id*, 12 September 2017, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20171109-024008-1263.pdf>, diakses 17 Oktober 2023.
- "NawaCita 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK", *nasional.kompas.com*, 21 Mei 2014, <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Naw.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>, diakses 16 Oktober 2023.

“Stok Cadangan Pangan Pemerintah Juni 2023 Mayoritas Masih di Bawah Target”, katadata.co.id, 26 Juni 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/26/stok-cadangan-pangan-pemerintah-juni-2023-mayoritas-masih-di-bawah-target-pangan-semakin-nyata-spi-perlu-reforma-agraria-dan-kedaulatan-pangan>, diakses tanggal 17 Oktober 2023.